

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga kestabilan moneter yang disebabkan atas kebijakannya terhadap simpanan masyarakat serta sebagai lalu lintas pembayaran. Bank merupakan suatu badan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Lembaga perbankan berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.

Menurut UU Nomor 10 tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank tidak dapat memulai usahanya sebelum mendapat izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Adapun fungsi utama dari Bank Perkreditan Rakyat meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, dan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain).

Dalam kurun waktu tahun 2012-2014 terjadi penurunan terhadap jumlah BPR di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menjadi pertimbangan untuk melakukan penelitian terkait penyebab penurunan jumlah BPR di Provinsi Jawa Tengah. Berikut data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.

Tabel 1.1
Jumlah BPR di Provinsi Jawa Tengah

Bulan	Jumlah BPR tahun 2012	Jumlah BPR tahun 2013	Jumlah BPR tahun 2014
Januari	263	259	252
Februari	263	260	252
Maret	263	250	252
April	263	251	251
Mei	263	251	251
Juni	263	251	251
Juli	263	251	251
Agustus	263	251	251
September	263	251	251
Oktober	263	251	251
November	260	251	251
Desember	260	251	251

Sumber: Direktori Bank Indonesia

Berdasarkan tabel di atas terlihat penurunan jumlah BPR pada tahun 2012-2014 di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut disebabkan karena banyak BPR yang terpaksa dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena

mengalami kondisi bermasalah terkait dengan *Fraud* (penggelapan dana) dan *Non Performing Loan* (kredit bermasalah). Selain itu, faktor permodalan juga masih menjadi kendala (www.lps.go.id). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK 03/2015 tentang kewajiban pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat bahwa BPR wajib memenuhi dan menjaga modal inti minimum yang telah ditetapkan sebesar enam miliar rupiah. BPR yang tidak memenuhi jumlah modal inti minimum yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi yaitu penurunan tingkat kesehatan BPR, larangan untuk membuka jaringan kantor, larangan untuk melakukan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing dan layanan perangkat perbankan elektronik, pembatasan wilayah penyaluran dana menjadi satu kabupaten yang sama dengan lokasi kantor BPR, dan pembatasan remunerasi atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Dewan Komisaris atau Direksi BPR, atau imbalan kepada pihak terkait.

Pada tanggal 16 April 2014 PT. BPR Tugu Kencana yang beralamatkan di Jalan Adi Sumarmo No.171, Kartasura-Jawa Tengah telah dicabut izin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.8/KDK.03/2014 dengan jangka waktu likuidasi tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2015 (satu tahun). Lembaga penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 7 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya. Alasan dari pencabutan izin usaha BPR tersebut bangkrut karena adanya masalah *Fraud* (penggelapan dana) yang diselewengkan oleh pemegang saham minoritas, saat ini kasusnya sudah

ditangani oleh pihak kepolisian. Pencabutan izin usaha tersebut dilakukan karena BPR tersebut tidak dapat memperbaiki kinerja keuangannya hingga memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pihak LPS sudah memberikan kesempatan selama 180 hari untuk melakukan upaya penyehatan yang nyata. Namun sampai batas waktu yang ditentukan BPR Tugu Kencana tidak dapat memperbaiki kondisi BPR untuk keluar dari status bank dalam pengawasan khusus. Sebelum ditutup, BPR tersebut masuk dalam status bank dalam pengawasan khusus sejak tanggal 24 September 2013. Penetapan status tersebut disebabkan kesalahan pengelolaan manajemen BPR yang mengakibatkan kinerja keuangan di bawah standar yang ditetapkan. Aset BPR per April 2014 di Jawa Tengah sebesar Rp 17,3 miliar. Untuk kredit BPR di Jawa Tengah sudah menyalurkan Rp 13,4 miliar. Sedangkan untuk dana pihak ketiga untuk BPR di Jawa Tengah mencapai Rp 12,3 miliar. Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) untuk BPR di Jawa Tengah sebanyak 6,5%. Adapun ketentuan yang tidak dapat dipenuhi BPR Tugu Kencana diantaranya memiliki *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum sebesar 4% dan rata-rata *Cash Ratio* dalam enam bulan terakhir sebesar 3% (www.soloblitz.co.id).

Dengan ditutupnya BPR Tugu Kencana, maka semenjak berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Solo, sebelumnya BPR Sukowati di Sragen juga dicabut izinnya oleh OJK. Pada tanggal 23 Januari 2013 PT. BPR Sukowati Jaya yang beralamatkan di Jalan Setyabudi No.31B, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah telah dicabut izin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/3/KEP.GBI/2013 dengan jangka waktu

likuidasi tanggal 28 Januari 2013 sampai tanggal 27 Januari 2014 (satu tahun). Alasan pencabutan izin usaha BPR Sukowati Jaya karena adanya tunggakan kredit macet yang ada di BPR tersebut. BPR tersebut masuk status dalam pengawasan khusus (DPK) sejak tanggal 2 Juli 2012 dan berakhir pada 28 Desember 2012. Hingga tanggal 28 Desember 2012, BPR Sukowati Jaya tidak dapat memperbaiki kinerja keuangannya. BPR Sukowati Jaya tidak dapat memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau rasio kewajiban penyediaan modal minimal 4%. Bahkan, berdasarkan laporan terakhir posisi November 2012, CAR BPR tersebut -34,49%. Berdasarkan laporan BPR Sukowati Jaya kepada BI Solo, per November 2012 BPR Sukowati Jaya memiliki dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan senilai Rp 3,0 miliar, deposito Rp 1,5 miliar, aset Rp 7,58 miliar dan kredit Rp 5,08 miliar. Kredit macet di BPR yang sejauh ini masih mencapai Rp 3,2 miliar atau sebesar 7% dengan jumlah nasabah mencapai 211 nama. Total dana yang sudah digelontorkan LPS untuk mengganti dana nasabah BPR Sukowati Jaya dari tahap satu hingga ketiga mencapai Rp 6,2 miliar. Setelah pencairan tahap terakhir selesai, pihaknya kini tinggal menyiapkan laporan pencairan dana dan hasil penarikan kredit milik nasabah penyimpan ke LPS pusat. Sesuai waktu yang diberikan oleh LPS dipatok maksimal 75 hari sejak tanggal pencabutan izin BPR, maka laporan harus sudah disampaikan sebelum tanggal 13 Mei 2013 mendatang. Pada tanggal 13 Mei 2013 lalu, baru ada tujuh nasabah pemilik simpanan yang sudah melunasi kreditnya. Tujuh nasabah yang memiliki simpanan senilai total Rp 102 juta itu sudah melunasi kreditnya sebesar Rp 108 juta. Sementara, sisanya masih ada 109 nasabah simpanan yang belum melunasi kewajiban kreditnya yang mencapai angka Rp 2,277 miliar

dengan simpanannya hanya Rp 123 juta. Tujuh nasabah yang sudah melunasi kredit macetnya itu sudah dilaporkan ke LPS pusat dan sampai sekarang masih menunggu keputusannya. Apabila sudah mendapatkan keputusan, mereka bisa mencairkan simpanan mereka. Tim likuidasi yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mengambil alih PT. BPR Sukowati Jaya Sragen, mulai melucuti aset-aset milik eks Direktur Utama PT. BPR Sukowati, Wahyu Wijayanto. Dua aset yang sudah diambil alih saat ini berupa rumah pribadi serta sebuah hotel di Karanganyar. Penyitaan dilakukan sebagai upaya untuk menutup kerugian BPR yang sudah dicabut izinnya oleh Bank Indonesia (www.soloblitz.co.id).

Dengan fenomena di atas maka kinerja keuangan suatu perusahaan terutama dalam bidang perbankan dapat dijadikan sebagai tolak ukur atas keberhasilan kelangsungan bisnis bank tersebut. Penilaian kinerja keuangan suatu bank bagi manajemen dapat diartikan sebagai penilaian terhadap prestasi yang dapat dicapai. Penilaian kinerja keuangan bank penting dilakukan, baik oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah, maupun pihak lain yang berkepentingan. Pada saat kondisi perbankan bermasalah maka akan berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup perbankan Indonesia yang ditunjukkan dengan semakin besarnya proporsi kredit yang bermasalah atau macet dan semakin rendahnya tingkat likuiditas bank yang berdampak pada kondisi bank, semakin sulit untuk meneruskan kegiatan usahanya. Bank Indonesia tidak mempunyai alternatif lain untuk mengatasi masalah tersebut selain dengan melakukan penutupan usaha bank atau yang lebih dikenal dengan istilah likuidasi. Dengan penutupan usaha

bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia mengakibatkan jumlah bank yang beroperasi menjadi semakin sedikit.

Terdeteksinya kondisi perbankan lebih awal dapat membantu bank tersebut melakukan langkah-langkah antisipasi guna mencegah agar krisis keuangan segera tertangani. Untuk menilai kinerja perbankan umumnya menggunakan beberapa aspek penilaian dilihat dari sisi tingkat kesehatan bank yang dibuat oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan aturan tingkat kesehatan bank tertulis dalam Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan menetapkan bahwa bank juga wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*), dengan cakupan penilaian terhadap *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan). Berlakunya Peraturan Bank Indonesia tersebut, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dicabut dan dinyatakan telah dirubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Dalam memprediksi kondisi bermasalah (*financial distress*) dapat dilihat dari kinerja perbankan yang dapat dilihat dari penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio keuangan. *Risk Profile*, yaitu penilaian terhadap risiko bank berkaitan dengan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko

reputasi. Dalam penelitian ini hanya memfokuskan 2 risiko untuk mewakili penilaian terhadap *Risk Profile* yaitu risiko kredit yang diukur dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dan risiko likuiditas yang diukur dengan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR). *Good Corporate Governance* (GCG) tidak diteliti karena merupakan aspek dengan penelitian kualitatif dan keterbatasan laporan karena Bank Perkreditan Rakyat tidak mempublikasikan laporan terkait dengan *Good Corporate Governance* (GCG). *Earnings* diukur dengan rasio *Return On Asset* (ROA), dan *Capital* diukur dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Non Performing Loan (NPL) adalah rasio yang memperlihatkan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas dengan total kredit yang diberikan bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur kualitas kredit dengan melihat total kredit yang diberikan dengan jumlah kredit yang bermasalah. Semakin tinggi rasio NPL kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Kun Ismawati (2015) menyatakan bahwa rasio NPL berpengaruh signifikan dalam memprediksi *financial distress* sedangkan Agus Baskoro (2014) menyatakan bahwa rasio NPL tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi *financial distress*.

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio LDR kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Kun Ismawati (2015) menyatakan bahwa rasio LDR berpengaruh signifikan dalam memprediksi

financial distress sedangkan Agus Baskoro (2014) menyatakan bahwa rasio LDR tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi *financial distress*.

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang memperlihatkan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Rasio ini digunakan untuk melihat keuntungan yang dicapai bank. Semakin tinggi rasio ROA kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah akan semakin kecil. Agus Baskoro (2014) menyatakan bahwa rasio ROA berpengaruh signifikan dalam memprediksi *financial distress* sedangkan Luciana dan Winny (2005) menyatakan rasio ROA tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi *financial distress*.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang dibiayai dari modal sendiri maupun dari sumber-sumber di luar bank. Rasio ini digunakan untuk melihat seluruh aktiva bank yang telah dibiayai dari modal bank sendiri. Semakin tinggi rasio CAR kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah akan semakin kecil. Luciana dan Winny (2005) menyatakan bahwa rasio CAR berpengaruh signifikan dalam memprediksi *financial distress* sedangkan Agus Baskoro (2014) menyatakan bahwa rasio CAR tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi *financial distress*.

Dari hasil penelitian di atas ditemukan adanya ketidakkonsisten pada pengujian data. Maka peneliti tertarik untuk menguji ulang mengenai analisis tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio keuangan untuk memprediksi *financial*

distress perbankan. Obyek dalam penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Jawa Tengah karena ditemukan kasus beberapa BPR yang terpaksa dilikuidasi oleh pihak LPS yang disebabkan oleh masalah *Fraud* (kecurangan) dan *Non Performing Loan* (kredit bermasalah). Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk memprediksi kondisi bermasalah (*financial distress*) pada Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Jawa Tengah. Dengan penjelasan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengangkat judul “ANALISIS RASIO KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN *RISK*, *EARNINGS* DAN *CAPITAL* UNTUK MEMPREDIKSI *FINANCIAL DISTRESS* BANK PERKREDITAN RAKYAT DI PROVINSI JAWA TENGAH.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah rasio *Non Performing Loan* (NPL) dapat digunakan untuk memprediksi *financial distress* Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Jawa Tengah ?
2. Apakah rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dapat digunakan untuk memprediksi *financial distress* Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Jawa Tengah ?
3. Apakah rasio *Return On Asset* (ROA) dapat digunakan untuk memprediksi *financial distress* Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Jawa Tengah ?

4. Apakah rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat digunakan untuk memprediksi *financial distress* Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Jawa Tengah ?

1.3 **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis rasio *Non Performing Loan* (NPL) untuk memprediksi *financial distress* Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) untuk memprediksi *financial distress* Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis rasio *Return On Asset* (ROA) untuk memprediksi *financial distress* Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Jawa Tengah.
4. Menganalisis rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk memprediksi *financial distress* Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Bank
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak perbankan yang bersangkutan dan informasi ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam menentukan strategi-strategi yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) yang akan menyebabkan kebangkrutan bank.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan Pemerintah dapat membantu menyelamatkan bank-bank yang diprediksi mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*).

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau tambahan referensi terkait dengan prediksi *financial distress*.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk membantu memperjelas arah, pandangan, dan tujuan penulisan penelitian ini, adapun sistematika dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan-alasan yang mendukung permasalahan dari penelitian, rumusan masalah yang berisi tentang masalah-masalah yang nantinya akan dicari jawabannya melalui penelitian, tujuan penelitian untuk mencari jawaban dari rumusan masalah penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan hal-hal yang bermanfaat yang ingin diperoleh dengan dilakukannya penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini yang terdiri dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian sekarang, teori-teori ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan kerangka pemikiran

yang memberikan gambaran bagaimana alur hubungan variabel yang akan diteliti serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, data, dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian dan juga data yang sudah diolah dengan menggunakan alat uji statistik untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak serta dilakukan pembahasan terhadap hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup dari penulisan skripsi ini menyimpulkan hasil dari analisis yang telah dilakukan. Di samping itu, disertakan pula beberapa keterbatasan dari penelitian ini serta saran yang diharapkan dapat dipakai sebagai bahan perbandingan agar tidak salah dalam pengambilan keputusan selanjutnya.